



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat-Nya penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja atau LKjIP merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2017-2018, yang diuraikan dalam bentuk pencapaian target target indikator sasaran strategis sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Dalam Laporan Kinerja ini juga diuraikan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sudah memuaskan, untuk itu kinerja ini harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018, selain menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi, dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang agar pelaksanaan kinerja ke depan berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Padang Panjang, Januari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam LKjIP ini dipaparkan evaluasi atas capaian dan tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018, yang berguna sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk lebih mengetahui hasil kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang periode tahun 2018
3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja.

Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

C. Penjelasan Umum Organisasi

C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.
- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan E-Government, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Aplikasi Informatika dan Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Aplikasi Informasi dan Statistik.
- c. **Seksi Layanan e-Government**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan e-Government.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

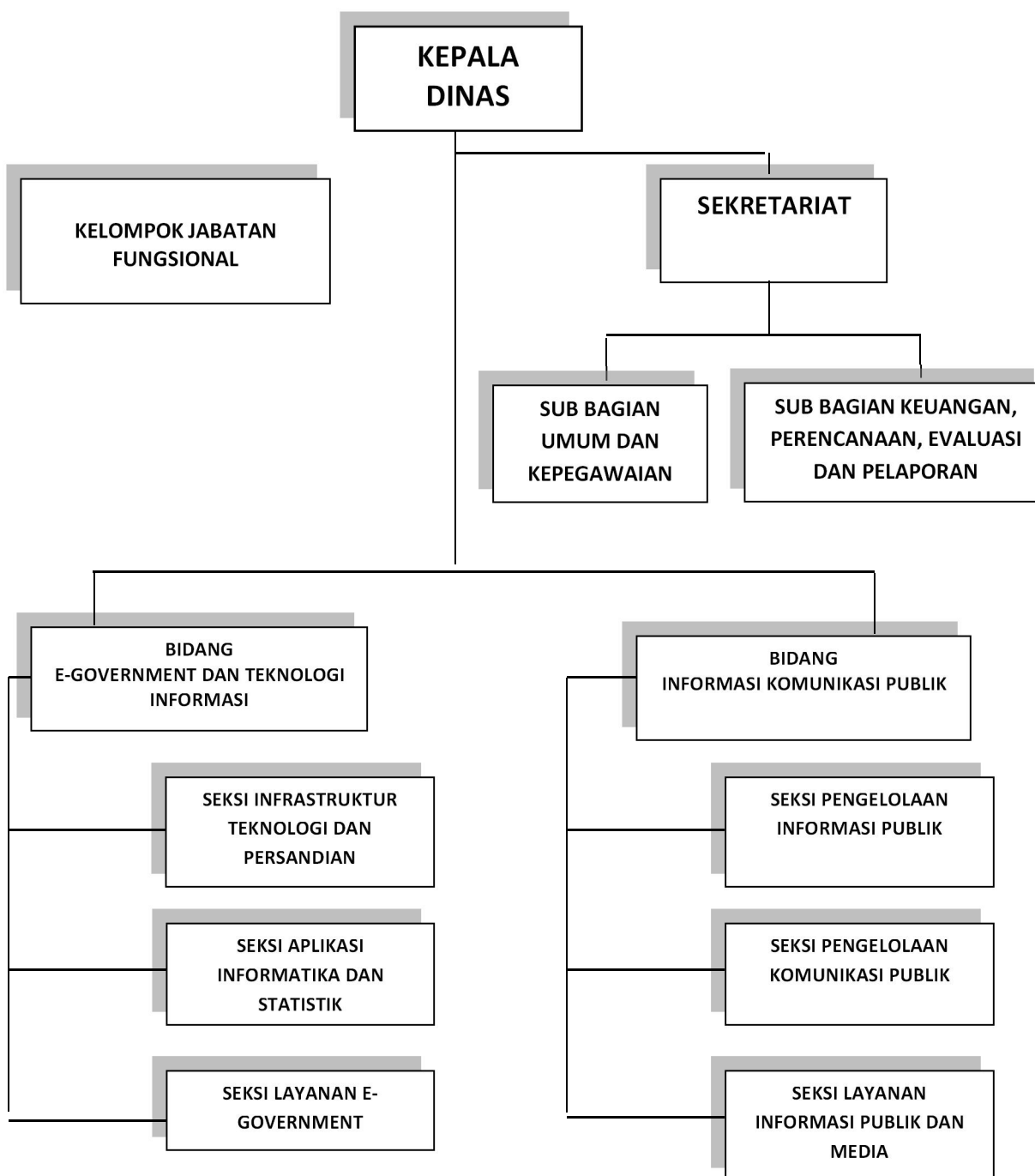
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Layanan Informasi Publik dan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2018, berjumlah sebanyak 43 (Empat puluh tiga) orang, yang terdistribusi pada Sekretariat dan Bidang. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 23 orang atau 53 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 20 orang atau 47 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 83 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2).

Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	4
3	Strata 1	10
4	Diploma 3	5
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SLTA	4
8	SLTP	-
9	SD	-
	J u m l a h	23

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1. 2
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1
2	Pembina Tingkat I / IV.b	2
3	Pembina / IV.a	1
4	Penata Tingkat I / III.d	2
5	Penata / III.c	7
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	4
7	Penata Muda / III.a	4
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1
9	Pengatur / II.c	1
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-
11	Pengatur Muda / II.a	-
12	Juru Tingkat I / I.d	-
13	Juru / I.c	-
14	Juru Muda Tingkat I / I.b	-
15	Juru Muda / I.a	-
	J u m l a h	23

C.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna untuk menunjang kinerja pelayanan dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana kerja yang tersedia, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SERTIFIKASI BARANG	BANYAK BARANG	KEADAAN			KET
	NAMA/JENIS BARANG		B	RR	RB	
1.	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	5	5	-	-	Unit
3.	Meja 1/2 biro	13	13	-	-	Unit
4.	Meja biro	3	3	-	-	Unit
5.	Meja rapat	16	16	-	-	Unit
6.	Kursi Tamu	2	2	-	-	Set
7.	Kursi sandaran rendah	2	2	-	-	Unit
8.	Kursi sandaran sedang	4	4	-	-	Unit
9	Kursi Sandaran tinggi	6	6	-	-	Unit
10	Filling kabinet	2	2	-	-	Unit
11	Kursi kerja	4	4	-	-	Unit
12	Komputer/PC	4	4	-	-	Unit
13	Komputer Server	5	5	-	-	Unit
14	PC All in 1	2	2	-	-	Unit
15	Komputer Multimedia	2	2	-	-	Unit
16	Personal Computer	2	2	-	-	Unit
17	Notebook	3	3	-	-	Unit
18	Laptop	15	15	-	-	Unit
19	Hardisk	1	1	-	-	Unit
20	UPS	8	8	-	-	Unit
21	Videotron	2	2	-	-	Unit
22	Panel LED	8	8	-	-	Unit
23	Kabel fiber optik	1	1	-	-	Unit
24	Video Recorder	1	1	-	-	Unit
25	Router	15	15	-	-	Unit
26	Switch	2	2	-	-	Unit
27	GPS	1	1	-	-	Unit
28	SWR Meter	1	1	-	-	Unit
29	Antena radio wireless	20	20	-	-	Unit
30	Mesin Absensi	1	1	-	-	Unit

31	Box Panel fan	44	44	-	-	Unit
32	Electrical box panel	2	2	-	-	Unit
33	AVR 10000VA	1	1	-	-	Unit
34	CCTV Outdoor NVR	4	1	-	-	Unit
35	Amplifier TOA	1	1	-	-	Unit
36	Speaker ceiling TOA	1	1	-	-	Unit
37	Penangkal petir	8	8	-	-	Unit
38	Rak kayu	1	1	-	-	Unit
39	Kursi biro	2	2	-	-	Unit
40	Kursi 1/2 biro	8	8	-	-	Unit
41	Kursi rapat	20	20	-	-	Unit
42	Gorden Momos	1	1	-	-	Set
43	Mesin Fax	1	1	-	-	Unit
44	Printer Scanner	4	4	-	-	Unit
45	Proyektor infocus	1	1	-	-	Unit
46	Layar infocus	1	1	-	-	Unit
47	Lemari kaca	5	5	-	-	Unit
48	Televisi	3	3	-	-	Unit
49	Tabung Damkar	2	2	-	-	Unit
50	Besi teralis	1	1	-	-	Unit
51	Papan nama instansi	1	1	-	-	Unit
52	Papan pengumuman	1	1	-	-	Unit
53	Mic Wireless Portable	1	1	-	-	Unit
54	CCTV Kantor	7	7	-	-	Unit
55	Slinger	60	60	-	-	Meter
56	AC Unit Panasonic	3	3	-	-	Unit
57	Access Point	30	30	-	-	Unit
58	Drone	1	1	-	-	Unit
59	Kamera	1	1	-	-	Unit
60	NVR	1	1	-	-	Unit
61	Server	2	2	-	-	Unit
62	Gedung Kantor Permanen	399	399	-	-	meter
63	Garasi	132	132	-	-	meter
64	Instalasi Jaringan SIPKD	1	1	-	-	set

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kominfo masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat menunjang pelaksanaan tugas.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Dinas, Kominfo Tahun 2018

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2018

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, dan Misi

Memasuki tahun akhir periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang (2013 – 2018), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya **“KOTA PADANG PANJANG YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Padang Panjang 2018 – 2019, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu, dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 ditetapkanlah visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Padang Panjang”

Visi atau tujuan tersebut beranjak dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, dalam hal ini pada Misi ke-lima yaitu

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota”

dengan sasaran

“Terlaksananya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Di Bidang Teknologi Informasi”.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018, ditetapkanlah tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagai berikut :

Tabel 2.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke		Ket
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintah Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kota Padang Panjang	Terimplemen- tasikannya E Governments	Indeks Layanan E Government	2	2,5	Skala (1-4)
		Berkembangn- ya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Persentase Penyediaan Daftar Informasi Publik	30%	50%	Persentase

C. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2018 melalui kegiatan tahunan. Dokumen penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan rencana capaiannya.

Penetapan kinerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PENETAPAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Terimplementasikannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan E Government	2,6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 3. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Pengelolaan Website Kota Padang Panjang 5. Penyusunan Rencana Induk E Government Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 6. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi	Rp. 904.100.000 Rp. 858.600.000 Rp. 801.523.900 Rp. 51.600.000 Rp. 38.950.000 Rp. 150.585.000
2	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Penayangan dialog interaktif pada media televisi 2. Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial 3. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 4. Pengelolaan Media Luar Ruang (Videotron) 5. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional 6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 7. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp. 185.780.000 Rp. 159.600.000 Rp. 48.250.000 Rp. 89.238.150 Rp. 109.400.000 Rp. 1.820.410.000 Rp. 112.500.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja untuk mendukung 2 (dua) sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terimplementasikannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan E Government	2,6	2,7	104
2	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	90%	133%	148

Dari 2 indikator kinerja tersebut, seluruh indikator kinerja berhasil mendapatkan hasil yang baik.

Penjelasan pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat di bawah ini :

Sasaran Strategis 1 : Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Fasilitasi Peningkatan SDM TI dengan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.805.358.900,- dengan realisasi sebesar Rp.2.404.034.730,- atau 86%. Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran ini, sesuai IKU Dinas Kominfo ditetapkanlah indikator kinerja berupa pencapaian indeks LeGo (Layanan e Government).

Pengukuran indeks LeGO ini bersumber dari 3 aspek penilaian sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang meliputi kebijakan e-government, tata kelola e-government dan layanan e-government.

Formula yang digunakan untuk mengukur Indeks LeGO adalah sebagai berikut :

$$= 0,25 * Kebijakan e-Government + 0,25 * Tata Kelola e-Government + 0,5 * Layanan e-Government.$$

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan E Government	2,6	2,7	104

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian untuk indikator kinerja ini cukup tinggi sebesar 104%, dimana dari indikator indeks layanan e government yang ditargetkan

mencapai nilai 2,6 (skala 1-4) dalam artian “baik” dapat terealisasi sebesar 2,7 dalam artian sudah melebihi target.

Terkait dengan keterangan sebelumnya, pencapaian nilai indeks ini diukur melalui penilaian 3 komponen utama SPBE dalam hal ini kebijakan, tata kelola dan layanan yang akan dirinci lebih lanjut pada lampiran yang bersumber dari laporan akhir masterplan Smart City Kota Padang Panjang.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya

Sasaran Srategis 1 : Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2017	2018
1	Indeks Layanan E Government	na	2,7

Berdasarkan tabel di atas, indeks LeGo ini belum dapat diukur capaiannya pada tahun 2017 dikarenakan belum tersedianya data penilaian untuk indikator ini, sementara indikator ini termuat dalam Revisi Renstra Dinas Kominfo 2017-2018

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra

Sasaran Srategis 1 : Terimplementasikannya Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2018	Capaian %
1	Indeks Layanan E Government	2,6	2,7	104

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2018 ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Dinas Kominfo 2017-2018, dengan capaian kinerja 104 %.

Dari beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ini sudah cukup baik dan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Capaian ini dapat terlihat dengan berkembangnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diantaranya dengan penerapan teknologi informasi menggunakan aplikasi, media internet atau media online, khususnya website di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hingga akhir tahun 2018 sudah tersedia jaringan internet di 51 titik Metro-E (OPD, Kelurahan, Puskesmas) dan 50 titik Wifi.id . Selain itu juga terdapat sebanyak 11 (sebelas) buah subdomain, dan 11 (sebelas) Sistem Informasi pelayanan publik , dan 12 (dua belas) Sistem Informasi layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian Kemenkominfo, Kota Padang Panjang pada tahun 2018 juga termasuk dalam 100 kabupaten/Kota di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dalam gerakan menuju SmartCity di Indonesia.

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan e- government. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen tinggi Kepala Daerah dalam penyusunan dan implementasi Masterplan Smart City Kota Padang Panjang yang disusun melalui inisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Ketersediaan infrastruktur untuk pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung berjalannya beragam sistem informasi utama pemerintah kota.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.525.178.150,- dengan realisasi sebesar Rp.2.308.610.46,- atau 91 %.

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi
terkait kebijakan publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	90%	133%	148

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sangat tinggi sebesar 133 %.

Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi ini diukur menggunakan formula sebagai berikut:

$$=(A+B)/2$$

(Dimana A adalah Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) & Media Tradisional yang terbentuk /jumlah target x 100%, dan B merupakan Jumlah jenis berita OPD yang terpublikasikan /jumlah target x 100%.)

Dari target pembentukan kelompok KIM dan Media Tradisional pada akhir tahun 2018 sebanyak 8 kelompok dapat terealisasi sesuai target yakni terbentuknya 8 kelompok. Sementara terkait publikasi/release berita yang ditargetkan sebanyak 360 berita selama 1 tahun terealisasi sebanyak 599 release.

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir dan target capaian Renstra OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

**Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun sebelumnya
Sasaran Srategis 2 : Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi
terkait kebijakan publik**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator	
		2017 (%)	2018 (%)
1	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	70 (4 dari 4 target kelompok, dan release berita 146 dari target 360)	133 (8 dari 8 target kelompok, dan release berita 599 dari target 360)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah capaian yang cukup tinggi untuk indikator sebesar 1,9 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Renstra
Sasaran Srategis 2 : Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi
terkait kebijakan publik**

No	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi s.d 2018	Capaian %
1	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	50%	133%	266%

Dibandingkan target capaian untuk tahun akhir Renstra, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah capaian yang sangat tinggi untuk indikator yaitu sebesar 2,7. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya informasi yang disebarluaskan melalui release berita baik di media cetak maupun media sosial yang melampaui target. Sementara untuk pencapaian pembentukan KIM terealisasi sesuai target. Adapun faktor pendukung tingginya capaian kinerja untuk sasaran ini antara lain komitmen dan kebijakan dari Kepala Daerah dan dukungan Kepala OPD untuk mempublikasikan informasi pembangunan daerah berupa release berita yang up to date melalui berbagai media cetak dan media sosial (facebook, instagram, twitter) ini sangat dipengaruhi oleh

dukungan dan kebijakan kepala daerah untuk mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan pemerintah daerah dan menyajikannya dalam bentuk release berita yang *up to date*.

Sasaran RPJMD	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
----------------------	--

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, urusan bidang Kominfo berperan dalam pencapaian misi ke 5 (lima) yakni **MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA, dengan sasaran** Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dirumuskan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018		Realisasi
			Sebelum	Sesudah	
1.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	70 %	100%	143 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sudah melampaui target. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 70 % pada tahun anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu memperoleh capaian realisasi sebesar 100 % . Bila dilihat kaitannya dengan target akhir RPJMD pada tahun 2018 maka capaian realisasi ini sudah mencapai 143 %.

Indikator ini menggambarkan ketersediaan jaringan internet di Kota Padang Panjang yang mencakup 24 OPD, 16 Kelurahan dan 43 sekolah. Keberhasilan capaian ini didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah terutama dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk merealisasikan ketersediaan jaringan internet/bandwith sesuai

dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk perkantoran, sekolah dan beberapa lokasi strategis wifi id gratis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Keberhasilan capaian indikator kinerja keuangan diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2018 yang dialokasikan sebesar Rp.

9.857.314.000,- dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar 8.990.626.317,- atau 91,21%.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai	2.858.495.000,-	2.791.211.251,-	67.283.749,-	97,65
	-	-			
2	Belanja Langsung				
	- Belanja pegawai	82.538.150,-	73.640.715,-	8.897.135,-	89,2
	- Belanja barang & jasa	5.655.429.000,-	4.896.024.326,-	759.404.674,-	86,6
	- Belanja hibah	36.240.000,-	36.211.100,-	28.900,-	99,9
	Jumlah	9.857.314.000,-	8.990.626.317,-	866.687.683,-	91,21

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.990.626.317,- atau 91,21 % dibawah anggaran yang dikarenakan ada efisiensi pada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target.

Akuntabilitas keuangan berdasarkan program/kegiatan berdasarkan pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PENCAPAIAN SASASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Ket	Program & Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket			
					Realisasi	%				Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Terimplementasikannya Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan E Government	= (0,25 x kebijakan e gov) + (0,25 tata kelola e-gov) +(0,5 layanan e gov)	2,6	2,7	104	Skala 1-4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 904.100.000	Rp. 812.526.500	89,87				
								1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi							
								2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi					Rp. 858.600.000	Rp. 755.145.197	87,95
								3. Pembinaan dan Pengembangan Sitem Informasi					Rp. 801.523.900	Rp. 656.607.233	81,92
								4. Pengelolaan Website Kota Padang Panjang					Rp. 51.600.000	Rp. 50.678.200	98,21
								5. Penyusunan Rencana Induk E Government					Rp. 38.950.000	Rp. 9.293.875	23,86
								Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi					Rp. 150.585.000	Rp. 119.183.725	79,15
6. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi															

2	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan publik	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	$=(A+B)/2$ <p>A = Jumlah KIM& Metra yang terbentuk /jumlah target x 100%</p> <p>B = Jumlah jenis berita OPD yang terpublikasikan /jumlah target x 100%</p>	90%	133 %	148	8 dari 8 target kelompok, dan release berita 599 dari target 360	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7. Penayangan dialog interaktif pada media televisi	Rp. 185.780.000	Rp.22.721.575	12,23	
								8. Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial	Rp. 159.600.000	Rp. 155.182.200	97,23	
								9. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Rp. 48.250.000	Rp. 40.482.400	83,90	
								10. Pengelolaan Media Luar Ruang (Videotron)	Rp. 89.238.150	Rp. 71.930.715	80,61	
								11. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional	Rp. 109.400.000	Rp. 99.428.382	90,89	
								12. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp. 1.820.410.000	Rp. 1.814.924.100	99,70	
								13. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp. 112.500.000	Rp. 103.941.095	92,39	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sangat memuaskan dengan tingkat capaian rata rata di atas 100%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan ini adalah cukup tingginya komitmen dan dari Kepala Daerah dan dukungan dalam hal kebijakan untuk merealisasikan ketersediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pondasi dasar kesiapan kota Padang Panjang menjadi kota yang cerdas “Smart City”.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang menjadi “Smart City”, ada beberapa hal perlu ditindaklanjuti terkait pencapaian kinerja Dinas Kominfo di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Masih perlunya dukungan anggaran dan SDM TI yang mumpuni guna meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan, terkait banyaknya keluhan terkait lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan.
2. Perlunya koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi yang intens antara OPD dengan dinas Kominfo terkait penatalaksanaan TI guna percepatan pelaksanaan e-government .

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika sekalligus sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**


MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008